

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KECAMATAN TINGGI MONCONG
KABUPATEN GOWA**

MUHAMMAD JUFRI

Nomor Stambuk : 105640115110



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KECAMATAN TINGGI MONCONG
KABUPATEN GOWA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Politik

Disusun dan Diajukan Oleh

MUHAMMAD JUERI

Nomor Stambuk : 105640115110

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan
Pariwisata Di Kecamatan Tinggi Moncong
Kabupaten Gowa.
Nama Mahasiswa : Muhammad Jufri
Nomor Stambuk : 105640115110

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Anwar Parawangi, M.Si


Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan


Ir. H. Saleh Molla, MM


A. Luhur Prianto. S.IP. M.Si



PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1184/FSP/A.1-VIII/VIII/1438/2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2017.



TIM PENILAI

Ketua, Sekretaris,

Ir. H. Saleh Molla, M.M. **Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

Penguji:

1. Dr. H. Mappamiring, M.Si. (Ketua) (.....)
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. (.....)
3. A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si. (.....)
4. Rudi Hardi, S.Sos., M.Si. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muhammad Jufri
Nomor Stambuk : 105640115110
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 02 oktober 2017

Yang Menyatakan,



Muhammad Jufri

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga terkhusus kepada dosen pembimbing Dr. Anwar Parawangi, M. Si. sebagai pembimbing I dan Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos, M. Si. sebagai pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan kenikmatan intelektual yang tak ternilai harganya. Teriring Doa semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa menggolongkan upaya-upaya beliau sebagai amal kebaikan.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membina Universitas ini dengan sebaik-baiknya.
2. Bapak Ir. H. Saleh Molla, MM., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya, beliau telah berperan sebagai orang tua akademik bagi saya.
3. Bapak A. Luhur Prianto, S. Ip, M. Si., Selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah membina jurusan ini dengan sebaik-baiknya.
4. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun material.

★ Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 02 Oktober 2017

Muhammad Jufri

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar isi	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendekatan Terbentuknya Pariwisata	6
B. Pengertian Pemberdayaan	7
C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat	9
D. Tujuan Pemberdayaan.....	15
E. Pengembangan Pariwisata	16
F. Kerangka Pikir	26
G. Fokus Penelitian	28
H. Definisi Fokus Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	35
G. Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Obyek Penelitian	38
B. Letak Geografis Kecamatan Tinggi Moncong	50
C. Proses Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi Sektor Kepariwisata di Kabupaten Gowa	55
D. Pemberdayaan Masyarakat.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81

Daftar Tabel

Nama Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1	Jumlah Informan Penelitian.....	33
Tabel 2	Kawasan Wisata.....	41
Tabel 3	Jenis dan Jumlah Sarana Akomodasi.....	42
Tabel 4	Jenis dan Jumlah Restoran.....	43
Tabel 5	Jenis dan Jumlah sarana rekreasi dan hiburan	44
Tabel 6	Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan provinsi	45
Tabel 7	Kondisi jalan penunjang obyek wisata	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki kepulauan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan tersebut menjadi modal penting dalam pembangunan bangsa Indonesia. Disamping itu, Indonesia juga di kenal sebagai Negara majemuk yang kaya akan keberagaman suku, budaya, agama , maupun sejarah. Kedua potensi tersebut menjadi modal utama bangsa Indonesia untuk lepas landas menuju negara maju dan keluar dari zona kemiskinan.

Ironisnya, kekayaan alam yang dimiliki belum mampu membebaskan negeri ini dari jeritan kemiskinan. Kekayaan alam dan keberagaman bangsa Indonesia menyimpan banyak potensi sekaligus peluang berharga untuk membangun kepariwisataan Indonesia agar lebih bergairah di mata dunia serta memiliki karakteristik berdasarkan kearifan lokal. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting dalam menggali potensi dan membuat kebijakan terhadap pengembangan kepariwisataan, sehingga masyarakat lokal tergugah kesadarannya untuk menggali potensi dan bergerak membangun desa maupun kota masing masing.

Menurut Oka AYati (2008:2) prospek industri pariwisata di Indonesia sangat besar dan menggembirakan mengingat pariwisata dianggap sebagai “penyelamat”, penghasil devisa bagi Negara. Di samping itu, pertumbuhan sektor pariwisata mencapai 15 persen setiap tahunnya, sehingga pariwisata mampu mempercepat pemerataan pembangunan daerah urban, membuka

lapangan pekerjaan baru, meningkatkan produk hasil kesenian dan kebudayaan, serta memperluas pasar produk kecil kedunia internasional.

Menurut Mubyarto (saat itu menjabat kepala BAPPENAS, 1993) mengungkapkan bahwa pariwisata merupakan suatu sektor ekonomi yang terbukti mampu mengentaskan kemiskinan pada suatu daerah, karena di dalam pengelolaan pariwisata pasti akan mengalami dampak bagi masyarakat lokal.

Kepedulian dan komitmen, serta peran pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan telah di atur dan tertuang UU No.10 Tahun 2009 pengganti UU No.9 tahun 1990 tentang kepariwisataan yang menyebutkan bahwa dampak yang di akibatkan dari pengembangan kepariwisataan berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pelestarian lingkungan.

Sebagai upaya nyata, pada tahun 2007, pemerintah Indonesia giat mencanangkan *Visit Indonesia* sebagai upaya mempromosikan destinasi pariwisata Indonesia kepada wisatawan mancanegara maupun lokal untuk berwisata di Indonesia. Sejak adanya kebijakan tentang kepariwisataan itulah, pengembangan desa-desa wisata di Indonesia mulai bermunculan.

Lebih lanjut, pariwisata adalah perpindahan sementara yang dilakukan dengan tujuan dari pekerjaan-pekerjaan rutin, keluar dari tempat kediamannya. Wisatawan melakukan aktifitas selama mereka tinggal di tempat tujuan wisata dan fasilitas di buat untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan (Marpaung, 2002). Menurut Murphy dalam Pitana dan Gayatri (2005), pariwisata adalah

keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan wisata, perjalanan, industri, dan lain-lain).

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Soemardjan, 1977:58), pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi objek wisata. Dengan adanya perkembangan industri pariwisata di suatu wilayah, arus urbanisasi ke kota-kota besar dapat lebih ditekan.

Hal ini disebabkan pariwisata memiliki tiga aspek pengaruh yaitu aspek ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), aspek sosial (penciptaan lapangan kerja) dan aspek budaya (Hartono, 1974:45). Keberadaan sektor pariwisata tersebut seharusnya memperoleh dukungan dari semua pihak seperti pemerintah daerah sebagai pengelola, masyarakat yang berada di lokasi objek wisata serta partisipasi pihak swasta sebagai pengembang. Selain itu pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong juga harus lebih di kembangkan dan lebih di lestarian agar masyarakat yang dulunya tidak mempunyai pekerjaan, sehingga masyarakat mendapatkan kegiatan atau pekerjaan dengan mengelolah pariwisata untuk mendapatkan biaya hidup, dan masyarakat yang masih bergantung pada kehidupan orang lain akan lebih mandiri dengan mempunyai pekerjaan sendiri.

Setelah mengkaji berbagai uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan pariwisata yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : Pemberdayaan

Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat teoritis

Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.

b. Manfaat Pratis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk memberikan pembinaan tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pendekatan Terbentuknya Pariwisata

Hal-hal yang dapat dicapai dalam proses partisipasi terbentuknya Pariwisata adalah meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dan penguatan kelembagaan (*instutisinal strengthening*) komunitas lokal melalui proses belajar pengalaman (*experience based learning process*) dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek dan proses pemberdayaan.

Untuk itu langkah dan peranan pemerintah dalam pendekatan terbentuknya pariwisata menyagkut tiga hal:

- a. **Penyadaran (*concientization*)**, yaitu sebuah proses perilaku membangun pemahaman yang ditujukan untuk mempengaruhi kesadaran dan perilaku dalam rencana aksi dan implementasinya, sehingga masyarakat Tinggi Moncong paham akan potensi yang mereka miliki untuk membangun Pariwisata yang di kelolah masyarakat setempat.
- b. **Pengorganisasian Masyarkat (*communityorganizing*)**, yaitu upaya pemberdayaan masyarakat agar memahami dan sadar terhadap kerentanan dan kapasitasnya maupun kondisi lingkungannya serta memobilisasi masyarakat dalam merespon permasalahan maupun memenuhi kebutuhannya dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Sehingga, peran serta masyarakat dalam pengembangan desa wisata sangat utama dan penting bagi keberlangsungannya.

- c. Penghantaran sumber daya manusia (*resources delivery*), yaitu memberikan pengertian serta arahan kepada masyarakat akan keberadaan potensi yang bisa di manfaatkan sehingga mampu mengelolah sumber daya alam maupun manusia.

B. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan “ber” yang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya, mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *empowerment* dalam bahasa Inggris.

Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung, Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana masyarakat diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya, pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi

kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut

Menurut (Sumodiningrat, Gunawan, 2002) ; pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri

dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

C. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Para ilmuwan sosial dalam memberikan pengertian pemberdayaan mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang kajian, hal tersebut dikarenakan belum ada definisi yang tegas mengenai konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat para ilmuwan yang memiliki komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sulistiyani (2004:77) secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Soetomo (2011:25) masyarakat adalah sekumpulan orang

yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Menurut Aziz,(2005:136) pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses *partisipatif* di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Selanjutnya pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan (2007:86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk *memobilisasi* sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan *kreativitas* masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004:80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara

bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu.

Berikut tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto (2005:16) yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bidang yaitu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedang pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri.

Konsep pemberdayaan masyarakat di bidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan, dan penegakan nilai-nilai, gagasan, dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas.

Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidak berdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, mapan, kesehatan, pendidikan,

dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas.

Kemudian ketidak berdayaan adalah melemahnya *kapital* sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan keswadayaan) yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama.

Berdasar pendapat Sunyoto (2003:40-47) ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih dan kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*), upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, lapangan kerja, dan pasar.
3. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Berbicara tentang pendekatan, bila dilihat dari proses dan mekanisme perumusan program pembangunan masyarakat, pendekatan pemberdayaan cenderung mengutamakan alur dari bawah ke atas atau lebih dikenal pendekatan *bottom-up*. Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya untuk melaksanakannya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan dan penentuan kebijakan, atau dalam pengambilan keputusan.

Model pendekatan dari bawah mencoba melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Pendekatan yang dilakukan tidak berangkat dari luar melainkan dari dalam. Seperangkat masalah dan kebutuhan dirumuskan bersama, sejumlah nilai dan sistem dipahami bersama. Model *bottom* dimulai dengan situasi dan kondisi serta potensi lokal. Dengan kata lain model kedua ini menempatkan manusia sebagai subyek. Pendekatan *bottom up* lebih memungkinkan penggalan dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan. Hal ini disebabkan karena masyarakat lebih merasa “memiliki”, dan merasa turut bertanggungjawab terhadap keberhasilan pembangunan, yang nota bene memang untuk kepentingan mereka sendiri. Betapapun pendekatan *bottom-up* memberikan kesan lebih manusiawi dan memberikan harapan yang lebih baik, namun tidak lepas dari kekurangannya, model ini membutuhkan waktu yang lama dan belum menemukan bentuknya yang mapan.

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut:

1. Belajar dari masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan *relevansi* pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

2. Pendamping sebagai *Fasilitator*

Masyarakat sebagai pelaku konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3. Saling belajar

Saling berbagi pengalaman salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya

benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan *objektif* telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka.

D. Tujuan Pemberdayaan

Menurut catatan (Ife, 1995) dalam bukunya Miftachul Huda disebutkan bahwa pemberdayaan di tujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). “*empowerment aims to increase of the disadvantaged*,” tulis Ife. Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yaitu *power* dan *disadvantaged*.

a. Kekuasaan

Realitas yang terjadi di masyarakat, anatra satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain sering terjadi kompetisi yang tidak menguntungkan, kelompok masyarakat yang kaya cenderung mempunyai kekuasaan absolute. Elit politik yang menguasai jalannya pemerintahan menciptakan relasi yang tidak seimbang, sehingga pemberdayaan harus mampu membuka dan mendorong akses yang terbuka agar tidak terjadi dominasi.

b. Kekurangberuntungan

Lemahnya kekuatan yang dimiliki salah satu kelompok masyarakat menyebabkan mereka kurang beruntung. Sehingga pemberdayaan diharapkan

mampu menangani masyarakat yang kurang beruntung akibat dari faktor struktural, kultural, dan personal.

E. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata.

(Swarbrooke 1996,99) Terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu :

1. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi.
2. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi.
3. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pasar yang baru.
4. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung.
5. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

Dalam pengembangan pariwisata diperlukan aspek-aspek untuk mendukung pengembangan tersebut. Adapun aspek-aspek yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Fisik menurut UU RI No. 23 Tahun 1997 dalam Marsongko (2001), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Yang termasuk dalam lingkungan fisik berdasarkan lahan dari berbagai sumber, yaitu :

- a. Geografi. Aspek geografi meliputi luas kawasan DTW, Luas area terpakai, dan juga batas administrasi serta batas alam.
- b. Topografi. Merupakan bentuk permukaan suatu daerah khususnya konfigurasi dan kemiringan lahan seperti dataran berbukit dan area pegunungan yang menyangkut ketinggian rata-rata dari permukaan laut, dan konfigurasi umum lahan.
- c. Geologi. Aspek dari karakteristik geologi yang penting dipertimbangkan termasuk jenis material tanah, kestabilan, daya serap, serta erosi dan kesuburan tanah.
- d. Klimatologi. Termasuk temperatur udara, kelembaban, curah hujan, kekuatan tiupan angin, penyinaran matahari rata-rata dan variasi musim.
- e. Hidrologi. Termasuk di dalamnya karakteristik dari daerah aliran sungai, pantai dan laut seperti arus, sedimentasi, abrasi.

f. *Visibility*. Menurut Salim (1985;2239), yang dimaksud dengan *visibility* adalah pemandangan.

2. Aspek Daya Tarik Pariwisata dapat berkembang di suatu tempat pada dasarnya karena tempat tersebut memiliki daya tarik, yang mampu mendorong wisatawan untuk datang berkunjung.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diandalkan pemerintah untuk memperoleh devisa dan penghasilan nonmigas. Peran pariwisata dalam rangka pembangunan nasional sangat besar, peran tersebut antara lain berupa memperluas dan menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan angka pengangguran. Indonesia yang kaya akan potensi dan sumberdaya mempunyai peluang yang sangat besar untuk dikembangkan terutama untuk industri pariwisata. Karena industri pariwisata mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi, sehingga mampu dijadikan sebagai modal dalam pembangunan baik tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Pengembangan wilayah perdesaan tidak lagi hanya mengandalkan sektor pertanian secara murni, tetapi berkembang ke arah penyajian kegiatan wisata di sektor pertanian. Berangkat dari hal tersebut, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata membuat suatu program yang bernama Pariwisata Inti Rakyat (PIR) atau dengan istilah lainnya yaitu *community-based tourism*. Menurut PIR, Pariwisata adalah suatu kawasan yang menawarkan keseluruhan suasana keaslian pariwisata baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi

untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya air terjun, wisata alam, kebun teh, dan Bunker Peninggalan Jepang di Malino.

Dalam paradigma baru pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada masyarakat tersebut menuntut perubahan pendekatan dari pendekatan *top down* yang selama ini mendominasi proses pembangunan menjadi *bottom up*. Pendekatan ini sangat sesuai dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat dan merupakan hal pokok yang harus dijalankan.

Melalui pendekatan ini diharapkan pengembangan kepariwisataan menjadi dapat lebih diterima dan mampu memberikan nilai manfaat yang tinggi kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian masyarakat akan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pariwisata serta dapat menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab sebagai pelaku dan penentu pengembangan pariwisata dalam skala lokal.

Pendekatan pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari produk wisata dan pemahaman bahwa produk wisata merupakan proses rekayasa sosial masyarakat merupakan esensi dari pembangunan yang berbasis pada komunitas atau masyarakat (*communitybased development*). Konsep pembangunan ini merupakan salah satu pendekatan yang memiliki nilai strategis. Disatu pihak pendekatan ini diyakini mampu menciptakan produk wisata yang bercirikan lokal sebagai modal dasar dalam perencanaan dan pemasaran produk, dan dilain pihak akan dapat menciptakan ketahanan dan kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat.

Ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana serta aksesibilitas menjadi faktor yang penting dalam pengembangan pariwisata. Semakin memadai fasilitas dan sarana prasarana yang ada disuatu objek pariwisata akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kunjungan wisatawan. Dengan tingginya tingkat kunjungan wisatawan akan berdampak pada semakin tingginya pendapatan dari objek pariwisata.

Objek pariwisata dengan tingkat aksesibilitas yang tinggi, akan berdampak pada semakin tinggi minat wisatawan untuk melakukan kunjungan pada objek wisata tersebut. Tingkat aksesibilitas ini berupa aksesibilitas jalan maupun informasi. Kemudahan dalam mengakses jalan menuju objek pariwisata adalah faktor terpenting dalam rangka pengembangan pariwisata. Keberadaan jalan yang memadai akan mempermudah kunjungan maupun mobilitas wisatawan. Dengan tidak mengesampingkan kemudahan akses terhadap informasi objek pariwisata. Kemudahan dalam mengakses informasi berkaitan dengan objek wisata merupakan faktor pemicu dalam minat kunjungan wisatawan.

Pendekatan geografis yang mendasarkan pada aspek keruangan mempunyai kaitan erat dengan persebaran dari suatu objek pembahasan. Kajian tentang perkembangan pariwisata dapat dijadikan objek penelitian geografi karena terdapat hubungan pemikiran tata ruang, lingkungan, serta waktu dimana aneka bentuk pola kehidupan dan penghidupan manusia tergantung pada potensi yang dimiliki daerahnya masing-masing. Sehubungan dengan hal ini maka pengembangan desa wisata merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah desa yang lebih cenderung pada penggalan potensi pariwisata dengan memanfaatkan

unsur-unsur yang ada dalam desa sebagai atribut produk wisata. Kelahiran sebuah kegiatan wisata sepatutnya memperhatikan, melibatkan, dan memberikan peran yang proporsional kepada masyarakat setempat selaku pemilik sah dari lingkungan pariwisata.

Peran serta masyarakat setempat sangat penting, terkait dengan dasar dan arah pengembangan pariwisata. Salah satu pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam bidang pariwisata adalah melalui pengembangan pariwisata. Dimana dengan wisata perekonomian masyarakat diangkat melalui kegiatan pariwisata dimana pariwisata dikembangkan berdasarkan unsur-unsur kegiatan yang telah ada di tempat wisata serta ciri khas budaya setempat dengan kata lain pengembangan kegiatan pariwisata tidak terlepas dari ciri kegiatan masyarakat yang telah ada, baik aspek ekonomi maupun sosial budaya. Selaras dengan kebijakan tersebut, maka telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 September 1999 di Jakarta tentang program desa wisata sebagai perwujudan Pengembangan Pariwisata Inti Rakyat (PIR).

Sebagai daerah tujuan wisata, Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, memiliki sejumlah potensi objek dan daya tarik pariwisata alam maupun budaya dan produk unggulan dan berpeluang besar sebagai magnet kunjungan yang cukup kuat bagi wisatawan. Desa wisata di pada akhir tahun, Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Pariwisata tersebut dikelompokkan berdasarkan potensi yang dimiliki yaitu pariwisata alam.

Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa merupakan, kabupaten dengan objek wisata dan daya tarik wisata (ODTW) yang banyak dan beragam.

Beberapa jenis objek dan daya tarik wisata meliputi air terjun, wisata alam, kebun teh, dan Bunker Peninggalan Jepang di Malino. Jenis objek dan daya tarik wisata yang cukup potensial dari segi wisatawan adalah jenis wisata alam dan desa wisata. Salah satu diantara pariwisata yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.

pariwisata ini terletak di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Kawasan ini mempunyai potensi wisata yang berbasis pertanian (agrowisata) yang kaya akan aneka ragam produk markisah dan Tenteng Kacang campur gula merah Pegangan khas Malino. Suasana pariwisata yang masih asri dengan hawa yang sejuk pariwisata menawarkan suasana rekreasi yang berbeda dari wisata pada umumnya, sehingga pengunjung benar-benar menikmati kehidupan pariwisata yang nyaman dengan panorama pegunungan dan berbaur dengan masyarakat dalam kesehariannya. Potensi tersebut merupakan modal yang cukup kuat dan strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pengembangan pariwisata.

Selain itu, yang paling penting adalah bahwa warga secara tidak langsung telah ikut dalam pengembangan pariwisata dengan cara menata dan air terjun, wisata alam, kebun teh, dan Bunker Peninggalan Jepang di Malino dengan sebaik mungkin. Warga bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) serta Dinas Pertanian baik propinsi maupun kabupaten dalam rangka pengembangan pariwisata. Selain itu, pariwisata ini memiliki andalan lain yang tidak di miliki oleh pariwisata lain. Yaitu masalah perkebunan dan kreasi kerajinan tangan masyarakat khususnya kreasi anak muda dalam membuat baju sesuai ciri khas daerah malino tersebut.

Karakter sosial budaya dan kesenian masyarakat masih sangat kental dan masih dilestarikan oleh masyarakat desa wisata yang menambah lengkapnya potensi wisata yang disuguhkan kepada pengunjung. Beberapa jenis kesenian tersebut adalah sayur-mayur, buah-buahan dan yang terkenal tentang kacang dan tentang markisa Malino, adapun *handycraft* yang bisa dibawa pulang adalah kembang *Edelweys* yang diambil langsung dari puncak gunung Bawakaraeng.

Dan sekarang sudah dijual dipasar ini baju kaos yang bercorak khas Malino hasil kreasi dari anak-anak muda kreatif Malino. Selain potensi kesenian tersebut beberapa budaya atau adat tradisi yang masih dilestarikan adalah wiwit pada saat memulai panen, Selapanan dimana usia bayi mencapai 35 hari, tahlil. Dari segi kuliner, makanan khas desa ini sangat cocok untuk oleh-oleh, makanan tersebut adalah Markisa, strawberry, dan Tenteng Kacang campur gula merah Penganan Khas Malino.

pariwisata ini menawarkan beberapa paket wisata yang dapat dinikmati oleh para pengunjung. Paket wisata tersebut akan menambah wawasan para pengunjung serta menikmati keindahan alam desa tersebut. Paket wisata tersebut diantaranya air terjun, menyusuri kebun teh yang ada di daerah tersebut, kemudian wisata kebun berupa markisah, menunggangi kuda, serta mempelajari kesenian tradisional. Beberapa fasilitas juga disediakan untuk mendukung keberadaan desa wisata tersebut, yakni villa malino.

Penelitian ini untuk melihat perkembangan yang terjadi di Wisata. Penelitian tersebut dinilai berdasarkan tingkat sosial dan ekonomi dari masyarakat setempat, yang nantinya akan berpengaruh ke tingkat kesejahteraan yang dimiliki

sebagian besar masyarakat sekitar. Namun apabila penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Tinggi Moncong hanya ingin mengetahui sejauh mana peran serta masyarakat dalam mengembangkan pariwisata.

Adapun beberapa penelitian tentang dampak yang ada sebelumnya antara lain Widiyanto (2008) yang mengkaji tentang Pengembangan Pariwisata Perdesaan (Suatu Usulan Strategi bagi pariwisata). Hasil dari penelitian tersebut adalah pengembangan pariwisata, mengandalkan daya tarik alam, yaitu wisata alam, dan air terjun. Strategi yang hendaknya dikembangkan secara umum sebagai berikut, yaitu dengan meningkatkan pemasaran, kualitas SDM, kualitas pelayanan, dan memelihara mutu dari apa yang menarik dan ditawarkan oleh objek wisata tersebut. Selain itu, dukungan masyarakat sekitar tempat tinggal perlu lebih dioptimalkan, peranan organisasi dan dukungan modal usaha.

Penelitian yang mengkaji tentang dampak pariwisata terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kegiatan pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan melakukan observasi secara langsung dengan mewawancarai beberapa masyarakat di Kecamatan Tinggi Moncong.

Hasil dari penelitian tersebut adalah kegiatan pariwisata ini memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitar baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh positif dilihat dari segi ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Kegiatan pariwisata ini juga membuat

pendapatan PEMDA setempat meningkat sehingga daerah wisata ini perlu dijaga kelestariaanya untuk lebih menarik para wisatawan khususnya para wisatawan asing.

Kegiatan pariwisata ini juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar khususnya masalah lunturnya nilai-nilai budaya masyarakat setempat karena masyarakat cenderung meniru perilaku wisatawan asing yang sebenarnya tidak sesuai dengan nilai budaya setempat. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan desa wisata, mengetahui dampak perkembangan desa wisata terhadap kondisi sosial, mengetahui dampak perkembangan desa wisata terhadap kondisi ekonomi, menyusun arahan pengembangan desa wisata. Penelitian ini merupakan penelitian survei, dengan kepala keluarga sebagai responden. Analisa data dilakukan dengan metode skoring. Uji Wilcoxon digunakan untuk mengetahui signifikansi perkembangan pariwisata yaitu dengan membandingkan perkembangan sebelum adanya pariwisata dan sesudah adanya pariwisata. Dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong berdampak tinggi pada tingkat pendidikan masyarakat. Hal ini terkait dengan pendidikan berupa pelatihan keterampilan. Sedangkan dampak terendah adalah pada keamanan masyarakat.

Hal ini dikarenakan kondisi keamanan lingkungan yang sudah cukup kondusif sebelum keberadaan wisata sehingga paska keberadaan pariwisata Kecamatan Tinggi Moncong dampaknya tidak terlalu signifikan akan tetapi kondisi keamanan dirasakan meningkat. Keberadaan pariwisata di Kecamatan

Tinggi Moncong berdampak tinggi pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimana hal ini didasarkan pada kondisi rumah, kepemilikan kendaraan, dan kepemilikan barang elektronik. Sedangkan dampak ekonomi terendah adalah pada mata pencaharian. Masyarakat mempunyai kesadaran dan partisipasi yang tinggi dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan unit-unit dasar tindakan social seperti yang dikemukakan, bahwa keterlibatan tiap individu sangat mendukung dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan pariwisata. Dengan adanya pengembangan masyarakat setiap individu di dalam masyarakat berusaha untuk memberdayakan mereka sendiri melalui kegiatan yang ditujukan bagi wisatawan sehingga bisa menambah penghasilan mereka setiap harinya. Setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri dalam mengembangkan diri mereka sesuai kemampuan masing-masing. Dengan demikian apabila sebuah pengembangan masyarakat berhasil memberdayakan anggota masyarakat sesuai dengan keadaan desa wisata di daerah mereka.

Potensi wisata antara lain, air terjun, wisata alam, kebun teh, dan Bunker Peninggalan Jepang di Malino. Dengan dikembangkannya pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, maka hal tersebut akan memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Jadi pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa dimulai dari potensi wisata yang dikembangkan sebagai salah satu Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) yaitu

pelaku wisata antara lain: masyarakat setempat, pemerintah setempat, Pemerintah Kecamatan.

Berikut ini adalah bagan kerangka pikir pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.



G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data, sehingga tidak terjadi manipulasi terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan

memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka konsep. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan upaya yang dilakukan dalam memberdayakan masyarakat melalui pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan dengan pihak yang bersangkutan untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa

H. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan skema kerangka fikir diatas maka dapat kita kemukakan defenisi fokus sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
2. Bentuk kegiatan pemberdayaan adalah mengelola dan memanfaatkan tempat atau fasilitas yang ada di tempat wisata sebagai sumber penghasilan dengan menjaga dan melindungi tempat-tempat wisata yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong.
 - a. Perlindungan terhadap lingkungan dan budaya, yaitu, pemerintah memiliki otoritas dalam membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap wisata alam di sekitar tempat wisata

ini, baik itu menjaga lingkungan, maupun fasilitas yang dikelola oleh masyarakat setempat.

b. Membuka akses menuju tempat objek pariwisata, yaitu, akses merupakan salah satu pelayanan umum yang sangat penting untuk mudah dan tidaknya dijangkau menuju tempat wisata.

3. Upaya Pemerintah Kecamatan Tinggi Moncong dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adalah memfasilitasi, menyediakan sarana dan prasarana, dan memberikan pemahaman, memberikan pendidikan dan pelatihan, kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan dan mengelolah tempat wisata yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong.

a. Menyediakan sarana dan prasarana, yaitu, menyediakan kebutuhan untuk wisatawan, seperti penginapan, perbelanjaan, dan kebutuhan lainnya, yang juga ikut di kelolah oleh masyarakat. Dengan begitu pengunjung wisatawan yang datang lebih mudah mendapatkan kebutuhan mereka yang disiapkan oleh masyarakat yang ada disekitar tempat wisata, dan masrakat juga dengan sendirinya mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya.

b. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pengelola objek wisata dan masyarakat, yaitu, pemerintah membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pendidikan dan dan pelatihan untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.

4. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu tata kehidupan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Total waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dua (2) bulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Adapun pengambilan lokasi penelitian, agar mengetahui bagaimana bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui pengembangan pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.

B. Jenis Dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, sebagai penelitian lapangan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian (pemerintah, pengelola, masyarakat), misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain lainnya sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat di desa wisata dan menjelaskan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) yang dilakukan oleh pengelola dalam hal ini melalui pengembangan desa wisata (*tourism village*) dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Peneliti menggunakan metode kualitatif, karena peneliti mampu memahami situasi sosial secara mendalam.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai, (Moleong, 2001:3). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi secara langsung yang didukung oleh wawancara terhadap informan yang terkait. Pencatatan sumber data primer melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan bertujuan memperoleh informasi akurat yang diperlukan.

Adapun yang menjadi objek dalam sumber data ini adalah Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa dan beberapa warga masyarakat setempat. Pihak-pihak tersebut dipilih peneliti dengan alasan pihak-pihak tersebut berkompeten dan terkait langsung dengan objek masalah penelitian ini dan guna memenuhi keadilan hasil penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Selain kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama diperlukan juga data-data tambahan seperti dokumen dan lain-lain sebagai sumber data sekunder. Jadi data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperbolehkan melalui buku-buku, arsip, atau

dokumen, dan sumber data sekunder lain yang relevan dengan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang berpotensi dan berkompeten memberikan informasi tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: Camat, Sekretaris camat, Pengelola, Masyarakat/Pedagang, serta beberapa Pengunjung, yang berpotensi memberikan informasi tentang objek kajian dalam penelitian ini. Dalam rangka memberikan gambaran utuh tentang informan, maka berikut digambarkan tabel informan dalam penelitian ini:

Tabel informan Penelitian

No	Informan	Jumlah / Orang
1.	Camat	1 Orang
2.	Sekretaris Camat	1 Orang
3.	Pengelola	1 Orang
4.	Masyarakat/Pedagang	2 Orang
5.	Pengunjung	2 Orang
Jumlah / Total		7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah metode atau cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung,

(Sutrisno, 1986:172). Secara sederhana observasi dapat pula dipahami sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan langsung panca indra.

Objek observasi atau pengamatan langsung dalam penelitian ini adalah pola interaksi masyarakat di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, (J. Moleong, 2001:83). Metode wawancara dapat pula diartikan dengan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna ke dalam suatu topik tertentu, (Hartidjo, 1994:44).

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pola wawancara mendalam (*indepth interviews*) dan sistematis. Wawancara mendalam dan sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden/informan dalam hal ini beberapa warga masyarakat setempat. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal sampai akhir wawancara, karena biasanya pedoman tersebut telah tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan sederetan pertanyaan, dimulai dari hal-hal yang mudah dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks.

3. Dokumentasi

Studi dokumen (dokumentasi) yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku Catatan dan Alat Tulis

Alat ini berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data/informan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode induktif dan deduktif. Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta khusus atau peristiwa konkrit yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum (*generalisasi*). Sedangkan metode deduktif adalah metode berfikir yang menggunakan dalil-dalil atau pernyataan, atau fakta yang bersifat umum kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta dan faktor-faktor yang bersifat khusus.

Selain itu, untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Dalam melakukan analisis data peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian lapangan.
3. Penyajian Data (*data display*), yaitu kegiatan pengumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, grafik jaringan, tabel dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel ataupun uraian penjelasan. Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/ verification*), yang mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Penarikan kesimpulan dilakukan

secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan di lapangan sehingga data-data di uji validitasnya.

G. Keabsahan Data

Trigulasi bermaknayakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan di kumpulkan dari berbagai sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain, serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

1. Trigulasi Sumber, triangulasi sumberdilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi metode, Triangulasi metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu diuji kekuatan atau ketidak akuratnya.
3. Trigulasi waktu, yaitu Trigulasi waktu berkenan dengan waktu pengambilan data yang berbeda, agar data yang diperoleh lebih akurat dari setiap hasil wawancara yang telah dilakukan pada informan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Letak Geografis dan Administrasi Wilayah Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa secara geografis berada antara utara 120.36,6' bujur timur dari Jakarta dan 50.33,6' bujur timur dari kutub utara, sedang letak wilayah administrasinya antara 120.33,19' hingga 130.15,17' bujur timur, letak wilayahnya antara 50.5' hingga 50.34.7' lintang selatan dari Jakarta.

Sebagai kabupaten daerah otonom, sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros, pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. Berdasarkan wilayah administrasinya Kabupaten Gowa terbagi atas 18 wilayah Kecamatan, 123 Desa dan 44 Kelurahan dengan luas 1.883, 88 Km² atau 3,01% dari wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagian besar wilayah Kabupaten Gowa merupakan dataran tinggi yakni sekitar 80,17% dan 19,83% merupakan dataran rendah¹.

1. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Sumber Daya Manusia/Aparatur merupakan unsur penting penggerak dan organisasi yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategi organisasi, dilihat dari jumlah dan kualifikasinya, maka sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa yang cukup memadai secara kuantitas dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa per Desember 2015 sebanyak 23 orang dengan kualifikasi Pasca Sarjana (S2) 4 orang, berkualifikasi Sarjana (S1) 16 orang, berkualifikasi Sarjana Muda (D3) 1 orang dan berkualifikasi SLTA atau sederajat 4 orang SD 1 orang serta 5 orang berstatus tenaga honorer, sedangkan 75% diantaranya sudah mengikuti diklat-diklat kepariwisataan baik dilaksanakan di provinsi maupun dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat.

Sumber Daya Fisik adalah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa antara lain 1 (satu) Gedung Kantor, 1 (satu) Kendaraan roda empat.

2. Gambaran Potensi Pariwisata dan Kondisi Sarana dan Prasarana Objek dan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Gowa
- 2.1. Potensi Pariwisata Sejarah/Budaya

Adapun beberapa potensi kebudayaan dapat diperhitungkan untuk mampu mengisi pelaksanaan di bidang pariwisata sejarah/budaya seperti potensi/faktor:

- a) Sejarah kerajaan Gowa
- b) Peninggalan Kepurbakalaan
- c) Keaneka ragaman kesenian, baik dari rumpun maupun jenis kesenian dan festival
- d) Nilai-nilai Tradisional
- e) Permuseuman
- f) Bahasa, Aksara, dan Sastra

- g) Seni Kriya
- h) Masyarakat Gowa yang Agraris
- i) Seni budaya yang mengakar di tengah-tengah masyarakat pedesaan

2.2 Pariwisata Lingkungan

Dalam prinsip pengembangan pariwisata, kualitas lingkungan merupakan dasar utama yang senantiasa harus dijaga keutuhan sehingga situasi konflik tidak akan timbul bila lingkungan dikelola secara arif, keberadaan Gowa sebagai daerah yang memiliki konservasi sumber daya alam yang memadai, layak dapat dijadikan sebagai Kawasan Wisata Lingkungan, seperti:

1. Wisata lingkungan
 - a) Hutan tropis yang masih terpelihara dengan keanekaragaman flora dan fauna sebagai wisata lingkungan
 - b) Budaya bertani masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai wisata agro
 - c). Bentangan alam sebagai pagar hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai Wisata Petualangan dan Rekreasi Geowisata. Lingkungan pedesaan terstruktur yang dapat dimanfaatkan sebagai desa wisata
2. Usaha Pariwisata Yang Handal

Berarti bahwa setiap upaya yang dilakukan baik oleh usaha sarana wisata maupun jasa wisata usaha pariwisata dan pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata dalam memajukan pariwisata Gowa dilandaskan kepada:

- Berpandangan bisnis jauh ke depan
- Berwawasan wirausaha sejati
- Kemandirian

- Kesejajaran dalam bermitra
- Profesionalisme dalam bidangnya

3. Nilai - Nilai

- Masyarakat Gowa yang religius
- Nilai Budaya luhur masyarakat Gowa
- Perhatian pemerintah Kabupaten Gowa yang menetapkan pariwisata sebagai visi pembangunan di Kabupaten Gowa
- Masyarakat Gowa yang berbudaya
- Pariwisata dengan bernuansa alami dan ekonomi
- Konsep Pembangunan Mamminasata

4. Pengembangan Kawasan Wisata Andalan

Kawasan wisata merupakan pettuang yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Gowa. Keberadaan obyek wisata merupakan satu rangkaian area yang tak terpisahkan, diharapkan mampu dikembangkan sebagai obyek wisata terdepan dalam ranah daerah Kabupaten Gowa. Kawasan ini dapat dikembangkan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kepariwisataan.

Adapun Kawasan wisata yang diprioritaskan untuk dikembangkan yang ada di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 02 dibawah ini

No	Kawasan Wisata	No	Kawasan Wisata
1.	Kawasan Budaya (Sejarah Bala Lompoa)	31.	Air Terjun Karang Loe Cikoro
2.	Kawasan istana tamalate	32.	Penginapan Pesanggrahan dan VillaHappy Malino
3.	Kawasan sejarah makam Sultan Hasanuddn	33.	Gedung Pertemuan Malino
4.	Kawasan sejarah makam Syeh Yusuf	34.	Gedung Olah Raga Malino
5.	Kawasan Sejarah Makam Aru Palakka		Mess Pemda Malino

6.	Kawasan sejarah masjid tua katangka/ Kompleks makam raja-raja gowa	35	
7.	Kawasa Patualangan Gunung bawa karaeng	36.	Jembatan kambara “Sultan Hasanuddin dan Syekh Yusuf” Eko Wisata
8.	Kawasan hutan pinus malino		
9.	Kawasan wisata dan bili-bili	37.	
10.	Kawasan wisata benteg somba opu		Panorama gunung bawakaraeng
11.	Wisata pendidikan lingkungan	38.	
12.	Kawasan wisata danau mawang		Wisata Rumah Adat (Bekas Bate
13.	Kawasan wisata bala punranga	39.	Salapang/Galarrang)
14.	Kawasan wisata menuju		Kolam Renang Salewangang
15.	Kawasan Wisata Bontomarannu	40.	Malino
16.	Kawasan wisata Mangesu salajengi		Wisata Petualangan Gowa
17.	Kawasan wisata bontonompo	41.	Parang Bugisi
18.	Kawasan wisata benteng somba opu		Galeri seni
19.	Air terjun lembanna	42.	
20.	Air terjun bulu ba'lea bulu tana		Atraksi Budaya
21.	Air terjun bulan gantarang	43.	
22.	Air terjun tonasa		Monumen Patonro
23.	Air terjun gallang	44.	
24.	Air terjun urangi tongki bulu tana		Promosi dan Penyuluhan
25.	Air terjun balapunranga parangloe	45.	Wisata
26.	Air terjun takapa bulu tana		
27.	Air panas pencong biring bulu		
28.	Air Terjun Panaikang Bulutana		
29.	Air Terjun Ketemu Jodoh		
30.	Air Terjun Batu Ma'lonro		

Sumber Data: RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2010-2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa

a) Kondisi Sarana

Dalam kaitan pelaksanaan pengembangan potensi objek dan daya tarik wisata yang dimiliki, tidaklah terlepas dari perlunya dukungan sarana dan prasarana memadai, hal ini menghendaki adanya keterlibatan (pihak terkait) baik pihak swasta maupun pemerintah serta masyarakat di dalam rangka mengkomodir kebutuhan sesuai peruntukan kondisi objek secara terintegrasi dalam sebuah perencanaan yang bermuara pada perwujudan kepentingan timbal balik dengan

kata lain bahwa masing-masing pihak dibutuhkan sesuai peranan dan tanggung jawabnya.

Mengenai kondisi sarana pariwisata yang ada di Kabupaten Gowa, antara lain:

b) Sarana Akomodasi

Keseluruhan sarana ini terletak di Kecamatan Tinggi Moncong (Malino) yang berjarak 59 Km dari Ibu Kota Kabupaten, untuk mengetahui keadaan sarana akomodasi tersebut, dapat dilihat pada tabel (03) berikut:

Jenis dan jumlah sarana akomodasi di Kabupaten Gowa;

No.	Jenis Penginapan	Jumlah
1.	Hotel berbintang satu	-
2.	Hotel bunga melati	
	- Melati 1	4
	- Melati 2	7
	- Melati 3	8
3.	Non Melati	8
	Jumlah Keseluruhan	27

Sumber Data: RENSTRA 2010-2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa

c) Sarana Restoran dan Rumah Makan

Usaha rumah makan yang dikembangkan oleh masyarakat sebagai salah satu unsur penting yang dibutuhkan baik ditempat tujuan maupun persinggahan dari suatu perjalanan wisata. Untuk mengetahui keadaan sarana rumah makan di Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada tabel (04) di bawah ini:

Jenis dan jumlah restoran serta rumah makan di Kabupaten Gowa

No	Jenis rumah makan	Jumlah
1	Restoran : <ul style="list-style-type: none"> • Talam Gangsa • Talam Salaka • Talam Kencana 	2 - -
2.	Rumah Makan : <ul style="list-style-type: none"> • Garpu 1 • Garpu 2 • Garpu 3 	15 4 5
3.	Non Garpu	152
	Jumlah	178

Sumber Data: RENSTRA 2001-2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa

d) Sarana Hiburan Umum

Kegiatan rekreasi dan hiburan umum dalam perkembangan dinamika kepariwisataan tidak lagi sekedar kebutuhan penunjang tapi sudah merupakan sarana yang memiliki fungsi sama terhadap sarana yang menyediakan fasilitas menginap, makan dan minum yang ketiga-tiganya tidak dapat dipisahkan lagi menurut sebuah ukuran prioritas, rekreasi dan hiburan umum sudah menjadi kebutuhan wisatawan pada sebuah daerah tujuan wisata. Untuk mengetahui keadaan sarana hiburan umum di Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada tabel (05) berikut ini:

Jenis dan jumlah sarana rekreasi dan hiburan umum Di Kabupaten Gowa

No	Jenis sarana hiburan umum	Jumlah
1.	Bioskop : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas A • Kelas B 	- -
2.	Karaoke	4
3.	Rumah bilyar	2
4.	Panti Pijat	-
5.	Mandi Uap	-
6.	Gelagang Permainan <ul style="list-style-type: none"> • Kelas A • Kelas B • Kelas C 	- - -
7.	Gelagang Renang : <ul style="list-style-type: none"> • Kelas A • Kelas B 	5 -
8.	Padang Golf	1
9.	Fines(Tempat kebugaran)	1
10.	Kolam Temat mincing	1
11.	Kendaraan Air <ul style="list-style-type: none"> • Kelas A • Kelas B 	7 -
12.	Cendramata	7
Jumlah Keseluruhan		27

Sumber Data: RENSTRA 2010-2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa

e) Sarana Transportasi

Masyarakat Kabupaten Gowa didalam melakukan aktivitasnya sebahagian besar menggunakan angkutan darat, berdasarkan data terakhir tercatat 2.437 Unit, 150 diantaranya adalah kendaraan Taxi. Untuk kondisi lalu lintas penumpang dengan berfungsinya terminal Cappa Bungaya selamakurun waktu 1 tahun terakhir ini telah disinggahi sebanyak 357-564 buah kendaraan dengan jumlah penumpang sebanyak 4.314.462 orang. Angka-angkaini dapat memberikan gambaran empiris terhadap mobilitas masyarakat yang cukup tinggi di Kabupaten Gowa. Untuk situasi lalu lintas hubungan transportasi antar kecamatan dan kota dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, hal ini tentunya diharapkan diiringi dengan upaya peningkatan mutu jalan baik Provinsi maupun Kabupaten untuk memudahkan mobilisasi kunjungan wisata di Kabupaten Gowa.

f) Kondisi prasarana

a. Prasarana jalan

Dalam perencanaan pengembangan objek wisata di Kabupaten Gowa, kemudahan aksesibilitas yang menyangkut kondisi prasarana jalan memainkan peranan yang penting di dalam memudahkan kunjungan pada suatu lokasi objek yang menjadi tujuan wisata. Secara keseluruhan di Kabupaten Gowa panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, yakni 210.50 Km dan yang menjadi kewenangan Kabupaten 1.882 km. Untuk mengetahui kondisi penunjang jalan menurut jenis permukaan jalan dapat dilihat pada tabel (05) berikut ini:

Panjang jalan menurut jenis permukaan jalan provinsi dan kabupaten di Kabupaten Gowa.

Jenis peruntukan jalan	Panjang jalan		Jumlah
	Provinsi	Kabupaten	
1. Aspal	152,00	760,00	885,00
2. Kerikil	-	719,00	719,00
3. Tanah	-	524,00	524,00
4. Lainnya	-	-	-

Sumber Data: Statistik Kabupaten Gowa, Tahun 2010-2014

Sedang untuk mengetahui panjang ruas jalan yang ada serta kondisi yang menghubungkan objek wisata yang ada di Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel (07) berikut ini:

Kondisi jalan penunjang objek wisata dirinci menurut jenis permukaan jalan dan kualitasnya, Tahun 2010. Tabel 7 :

No	Keadaan jalan penunjang objek	Panjang jalan
1.	Jenis permukaan jalan	
	• Aspal	760
	• Pengerasan	719
2.	Tanah	524
	Kualitas	
	• Baik	481,75
	• Sedang	560
	• Rusak	393

Sumber Data: RENSTRA 2010-2014 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa

b. Prasarana listrik

Kondisi umum mengenai prasarana Listrik di Kabupaten Gowa, pemenuhan kebutuhannya sebagian besar masih tergantung oleh PLN

wilayah VII Cabang Makassar (PLN Ranting Sungguminasa), namun kebutuhan energi listrik ini telah dapat dinikmati oleh 115 Desa/Kelurahan dari 151 jumlah desa/kelurahan yang ada, jika dipersentasekan maka jumlah desa/kelurahan yang telah menikmati sebesar 76,2% berdasarkan pengamatan lapangan yang dilakukan dari seluruh proses jalan menuju daerah objek wisata yang memiliki kualifikasi berpotensi tinggi sampai sedang secara keseluruhan telah terjangkau jaringan listrik sampai pada tingkat wilayah pemerintahan desa/kelurahan, kondisi ini akan sangat memudahkan di dalam mensuplai kebutuhan listrik pada titik-titik lokasi objek yang sementara dalam proses pengembangan.

c. Prasarana Air Bersih

Di Kabupaten Gowa potensi sumber air bersih pada umumnya cukup besar baik merupakan air tanah maupun air permukaan yang bersumber dari mata air sungai. Kondisi geografis yang sebagian besar dataran tinggi ini dialiri 15 buah sungai dimana sungai terpanjang adalah sungai Jeneberang kira-kira 90 Km yang mencakup luas daerah aliran sungainya sebesar 881 Km² untuk keperluan suplai air bersih yang dialokasikan dari adanya waduk Bili-bili yang membendung aliran sungai Je'neberang ini diperkirakan dapat mengalokasikan kebutuhan air minum sebesar 35.000.000 m³ dan 270.000.000 m³ untuk keperluan air irigasi pada musim kemarau. Dalam hal ini penyediaan kebutuhan air bersih untuk menunjang pengembangan pariwisata terutama

terhadap pemanfaatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi usaha jasa perhotelan, rumah makan, penginapan serta tempat-tempat rekreasi pada lokasi objek wisata yang ada dianggap sangat memadai dan dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

d. Prasarana Telekomunikasi

Di Kabupaten Gowa potensi sumber air bersih pada umumnya cukup besar baik merupakan air tanah maupun air permukaan yang bersumber dari mata air sungai. Kondisi geografis yang sebagian besar dataran tinggi ini dialiri 15 buah sungai dimana sungai terpanjang adalah sungai Jeneberang kira-kira 90 Km yang mencakup luas daerah aliran sungainya sebesar 881 Km² untuk keperluan suplai air bersih yang dialokasikan dari adanya waduk Bili-bili yang membendung aliran sungai Je'neberang ini diperkirakan dapat mengalokasikan kebutuhan air minum sebesar 35.000.000 m³ dan 270.000.000 m³ untuk keperluan air irigasi pada musim kemarau. Dalam hal ini penyediaan kebutuhan air bersih untuk menunjang pengembangan pariwisata terutama terhadap pemanfaatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi usaha jasa perhotelan, rumah makan, penginapan serta tempat-tempat rekreasi pada lokasi objek wisata yang ada dianggap sangat memadai dan dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan.

g) Prasarana Telekomunikasi

Dengan keberadaan pelayanan jasa telekomunikasi di kabupaten Gowa yang terbagi atas 2 area pelayanan STO-5 Sungguminasa dan area pelayanan Kancatel Malino, maka usaha pengembangan prasarana telekomunikasi daerah semakin berkembang, baik dari segi teknis maupun jasa pelayanan yang diberikan. Hal ini tentu saja mempunyai implikasi positif dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Gowa. Dari hasil pendataan yang dilakukan, tercatat 17.831 jumlah sambungan untuk kebutuhan rumah tangga dan perkantoran serta 184 sambungan fasilitas untuk pelayanan telepon umum. Diharapkan bahwa kebutuhan akan jasa pelayanan telekomunikasi ini oleh pihak telkom dapat terus ditingkatkan hingga mencapai daerah titik-titik pusat pengembangan pariwisata di Kabupaten Gowa.

B. Letak Geografis Kecamatan Tinggi Moncong

Kecamatan Tinggi Moncong yang merupakan salah satu kecamatan yang tergabung dalam wilayah administrasi kabupaten Gowa, yang merupakan penyangga utama kota Makassar adalah salah satu daerah yang istimewa dibanding dengan daerah lainnya. Industri hortikultura, industri perkebunan dan industri agrowisata sudah merambah ke daerah ini, khusus di daerah Malino, ibukota kecamatan Tinggi Moncong adalah primadona pariwisata di Sulawesi Selatan. Daerah yang berada diatas ketinggian 1.500 DPL, ini juga pemasok utama tanaman hortikultura ke kota Makassar dan sekitarnya, bahkan hasil dari perkebunan ini sebahagian sudah di ekspor ke beberapa Negara di Asia dan Eropa. Keadaan geografisnya di Kecamatan Tinggi Moncong memang indah dan khas.

Kesemuanya ini baik langsung maupun tidak langsung menambah pendapatan penduduk, sehingga penduduk akan sejahtera, disamping itu perpindahan penduduk ke daerah ini meningkat dari tahun ketahun, tapi dibalik itu semua kita juga perlu menyadari akan dampak negatif yang timbul sebagai efek dari geliat ekonomi di daerah ini.

Atas alasan inilah, Penulis, mengambil daerah ini sebagai sampel dari praktek masalah kependudukan dan lingkungan hidup. Daerah di kecamatan Tinggi Moncong yang kami jadikan sampel adalah masyarakat lingkungan Bontotene, Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa serta industri pengolahan teh PT. Nittoh Malino Teh milik perusahaan Jepang yang terletak di lingkungan Pattapang, kelurahan yang sama.

Letak Geografis dan Keadaan Alam Kabupaten Gowa adalah salah satu penyangga utama Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan karena perbatasan langsung Kota Makassar, olehnya itu tidak mengherankan kalau daerah ini menjadi pemasok utama kebutuhan sehari-hari penduduk kota Makassar sebagai Ibu Kota Propinsi.

Daerah Kabupaten Gowa terletak antara utara $12^{\circ}.36,6'$ bujur Timur dan $5^{\circ}.33,6'$ bujur timur. Letak wilayahnya antara $12^{\circ}.33,19'$ - $13^{\circ}.15,17'$ bujur timur. $5^{\circ}.5'$ - $5^{\circ}.34,7'$ Lintang selatan. Adapun batas-batas wilayahnya meliputi:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan kabupaten Maros.
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Takalar;

c) Sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar.

d) Sebelah barat berbatasan dengan kota Makassar dan kabupaten Takalar.

Luas keseluruhan daerah ini adalah 1.883,33 Km², yang terbagi kedalam 18 kecamatan dan 158 Desa/kelurahan, berikut kecamatan-kecamatan di kabupaten Gowa ;

- 1) Kecamatan Somba Opu
- 2) Kecamatan Barombong
- 3) Kecamatan Bontomarannu
- 4) Kecamatan Palangga
- 5) Kecamatan Parangloe
- 6) Kecamatan Pattalassang
- 7) Kecamatan Tombolo Pao
- 8) Kecamatan Manuju
- 9) Kecamatan Tompobulu
- 10) Kecamatan Bontolempangan
- 11) Kecamatan Biringbulu
- 12) Kecamatan Tinggimoncong
- 13) Kecamatan Bungaya
- 14) Kecamatan Bajeng
- 15) Kecamatan Bontonompo
- 16) Kecamatan Bajeng Barat
- 17) Kecamatan Bontonompo selatan



18) Kecamatan Parigi

Curah hujan didaerah ini setiap tahun mencapai 2000-3000 mm, dengan suhu udara pada dataran rendah 22 c–26 c dan suhu pada dataran tinggi 18 c-21 c.

Dalam hal kemiringan tanah di kabupaten Gowa memiliki:

- 1) Kemiringan 0 – 2 m sebanyak 294,28 Km;
- 2) kemiringan 2 – 15 m sebanyak 263,79 Km;
- 3) kemiringan 15 – 40 m sebanyak 660 Km;
- 4) kemiringan diatas 40 m sebanyak 664,38 Km
- 5) Ketinggian daerah ini juga bervariasi antara:
 - 6) 0 – 25 m seluas 437,64 km;
 - 7) 25 – 100 m seluas 89,53 km;
 - 8) 100 – 500 m seluas 338,34 km;
 - 9) 500 – 1000 m seluas 439,79 km;
 - 10) diatas 1000 m seluas 350,03 km.

Selanjutnya pada daerah ini jumlah hari hujannya setiap bulan bervariasi, dan bulab yang paling banyak hari hujannya adalah bulan Nopember, Desember, januari, Pebruari dan Maret, jumlah curah hujannya juga paling besar diantara bulan tersebut.

Penduduk yang tersedia dalam hal kuantitas merupakan potensi yang cukup besar dalam membangun suatu daerah. Kekurangan jumlah penduduk akan mempersulit jalannya suatu proses pembangunan sebab penduduk disamping sebagai obyek pembangunan juga berfungsi sebagai subyek pembangunan

.sebagai obyek merupakan faktor yang sangat penting, disamping merupakan uama dalam suatu proses penduduk.

Pangkaan kualitas penduduk adalah hal yang mutlak harus dilakukan, sebab penduduk adalah titik sentral faktor produksi lainnya atau sebagai motor penggerak dari faktor-faktor produksi lainnya. Upaya-upaya peningkatan produktivitas penduduk senantiasa dilakukan, dalam pengertian kuantitas penduduk diusahakan untuk dibina, diterampikan agar bisa berproduksi atau mendatangkan manfaat. Yang tentu dengan sendirinya akan menghasilkan kesejahteraan pembangunan.

Pembangunan kependudukan dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan upaya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam, penciptaan keserasian antara generasi serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Penduduk usia lanjut memiliki pengalaman dan kearifan yang luas sehingga perlu diberikan perhatian untuk berperan didalam pembangunan.

Selanjutnya pengendalian pertumbuhan penduduk juga dilakukan terutama untuk menurunkan angka kelahiran melalui gerakan KB Mandiri. Menurunkan angka kematian ibu dan anak Balita melalui program sayang ibu dan anak.

Pengendalian kuantias penduduk dilakukan dengan langkah yang berhubungan dengan penetapan jumlah, sruktur dan komposisi sera pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal.Pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk harus memperhatikan kemampuan daya dukung alam dan sesuai dengan tata ruang yang diselenggarakan melalui transmigrasi, peningkatan sarana penunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah sebaran, serta pemberian intensif

bagi tenaga kerja sehingga mampu menggairahkan tenaga terdidik/terlatih untuk mengabdikan di wilayah pertumbuhan baru.

C. Proses Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi Sektor Kepariwisata di Kabupaten Gowa

Dalam proses pembuatan dan penyusunan strategi terdapat tahapan-tahapan yang termasuk dalam pemeriksaan strategis dimana langkah ini merupakan bentuk pemeriksaan terhadap proses manajemen yang melihat organisasi dalam perspektif luas dan menyediakan penilaian komprehensif terhadap situasi strategis organisasi. Pemeriksaan strategis meliputi aspek-aspek utama proses manajemen strategis dan menempatkannya dalam kerangka kerja pengambilan keputusan. Perencanaan strategis merupakan tindakan awal yang perlu dibuat oleh pemerintah daerah dalam rangka menentukan strategi-strategi yang efektif untuk digunakan dalam mengembangkan sektor pariwisata, karena lebih bersifat komprehensif dalam arti lebih memfokuskan pada analisis lingkungan secara keseluruhan, baik lingkungan eksternal, maupun lingkungan internal.

Keputusan-keputusan tersebut perlu dilihat dari sudut pandang misi, tujuan, strategi dan kebijakan organisasi, untuk mengetahui strategi yang paling cocok. Adapun tinjauan yang dilaksanakan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa dalam rangka proses penyusunan strategi yang paling cocok adalah dengan melaksanakan tahap-tahap perencanaan strategis sebagai berikut :

1. Identifikasi Mandat Organisasi
 - a) Kedudukan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 07 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gowa. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang menuntut adanya efisiensi dalam struktur organisasi pemerintahan daerah

b) Struktur Organisasi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa terdiri atas Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Seksi-Seksi, UPTD, dan Kelompok Jabatan Profesional.

c) Sistematika Renstra

berdasarkan Surat Bupati Gowa No.050/1014/ Bappeda tanggal 05 September 2005 perihal Standarisasi Format Renstra Instansi Pemerintah Daerah.

d) Fungsi dan uraian tugas ditetapkan dalam Peraturan Daerah, Nomor 07 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum dilakukannya perubahan struktur organisasi, dimana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Gowa berubah menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gowa, dengan susunan sebagai berikut :

- 1 Kepala Dinas
- 2 Sekertaris
- 3 Bidang Kebudayaan
- 4 Bidang Usaha Paiwisata

- 5 Bidang Pengembangan Kawasan Wisata
- 6 Bidang Pemasaran Wisata
- 7 Unit Pelaksana Teknis dinas (UPTD)
- 8 Kelompok Jabatan Fungsional

1. Bentuk Kegiatan pemberdayaan

Bentuk kegiatan pemberdayaan adalah mengelolah dan memanfaatkan tempat atau fasilitas yang ada di tempat wisata sebagai sumber penghasilan dengan menjaga dan melindungi tempat-tempat wisata, serta membuka akses menuju tempat wisata yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong.

Dalam hal ini bentuk kegiatan pemberdayaan yang harus diadakan oleh masyarakat yang sangat didukung oleh pemerintah yaitu sebagai berikut

- a). Perlindungan terhadap lingkungan dan budaya (memberikan keamanan dan perlindungan terhadap fasilitas yang ada di tempat wisata)
- b). Membuka akses menuju tempat wisata

Dengan adanya beberapa kegiatan diatas masyarakat kecamatan tinggi moncong tersebut maka akan menjadi sorotan mata bagi para wisatawan untuk mendatangi pariwisata yang ada di kecamatan tinggi moncong. Sebagaimana hasil wawancara saya dengan Camat Tinggi Moncong H. J.S.R

“Mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat disini saya kira sudah bagus, Artinya dengan adanya kegiatan- kegiatan yang di bentuk oleh masyarakat setempat maka para wisatawan akan lebih menikmati keindahan dan pelayanan pariwisata ini”(wawancara dengan Ibu H.J.S.R tanggal 10 Juli 2015)

Hal yang senada diungkapkan oleh Ibu R.H selaku Sekretaris Camat:

“Masyarakat disini boleh saya bilang sangat beruntung karena memiliki alam yang begitu indah sehingga menjadi sorotan mata bagi wisatawan

baik wisatawan asing maupun lokal, kami sebagai pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat disini untuk mengelolah agar tempat wisata ini bisa memberikan tambahan penghasilan mereka .mereka hanya membentuk atau melakukan sesuatu hal yang bisa membuat para pengunjung merasa nyaman dan salah satu yang harus dilaksanakan adalah membentuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun ”(wawancara dengan Ibu R.H tanggal 10 Juli 2015)

Hal ini dibenarkan oleh salah satu masyarakat disana yang kebetulan beliau memiliki rumah penginapan dan sekaligus sebagai pengelola tempat wisata yang mengatakan:

“kami sangat senang bisa tinggal di kampung ini, memiliki alam yang indah, terdapat beragam tempat pariwisata, dan dengan adanya tempat pariwisata ini kami memiliki tambahan penghasilan dari para pengunjung yang menggunakan jasa kami baik tenaga ataupun sewa tempat tinggal. Sehingga menjadi tugas atau kegiatan kami hanya menjaga keindahan tempat ini agar para pengunjung merasa nyaman berekreasi disini”(wawancara dengan Ibu W.N tanggal 20 Juli 2015)

Dari pernyataan diatas sangat dibenarkan oleh salah satu pengunjung yang pada saat melakukan kunjungan kelokasi tempat penelitian saya. dia adalah pengunjung yang pertama kalinya datang ke Malino,, dia bernama A.D:

“saya baru pertama kalinya menginjakkan kaki di Malino ini dan rasanya saya tidak mau pulang, tempat ini bagus sekali dan masyarakatnya ramah. Selain mereka ramah-ramah saya juga sangat kagum dari usaha-usaha mereka menjaga kebersihan, keamanan dan mudahnya dijangkau tempat belanja, asalkan ada uang Sambil ketawa”(wawancara dengan Bapak A.D 20 Juli 2015)

Dari hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat setempat mendapat respon positif, baik dari pemerintah ataupun wisatawan. Semoga masyarakat di Kecamatan Tinggi Moncong ini lebih kreatif dan lebih semangat lagi menjaga tempat wisata ini. Karena dengan melakukan perlindungan lingkungan Alam dan budaya yang indah dan lestari merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup yang ada didalamnya khususnya di

Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Kesejahteraan itu sendiri adalah keseluruhan hasil usaha masyarakat, baik berupa benda ataupun hanya berupa pikiran dan tindakan. Bentuk perlindungan terhadap lingkungan alam yang mencakup keindahan tempat pariwisata dengan memberdayakan masyarakat untuk menjaga dan membersihkan obyek wisata di Kecamatan Tinggi Moncong seperti lingkungan sekitarnya, fasilitas-fasilitasnya.

1.1. Perlindungan terhadap lingkungan dan budaya (memberikan keamanan dan perlindungan terhadap fasilitas yang ada di tempat wisata)

Dalam hal ini pemerintah memiliki otoritas dalam membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap alam sekitar yang ada di sekitar tempat wisata ini baik itu menjaga keamanan dan perlindungan terhadap semua fasilitas yang ada karena kebudayaan sebagai sistem yang merupakan hasil adaptasi pada lingkungan alam atau sistem yang berfungsi untuk mempertahankan kehidupan masyarakat sekitar obyek wisata.

Sebagai mana hasil wawancara saya dengan Ibu H.J.S.R Camat Tinggi Moncong :

“Mengenai perlindungan atau keamanan alam dan budaya khususnya di Kecamatan Tinggi Moncong (Malino) kami sudah menugaskan beberapa orang penjaga ataupun yang membersihkan tempat tersebut (petugas SIR dan masyarakat setempat) , setiap harinya baik itu menjaga lingkungan yang ada di sekitar wisata Malino, maupun menjaga fasilitasnya, pariwisata ini mempunyai potensi yang cukup tinggi mulai dari paronama alamnya yang indah dan suasananya sejuk dan didukung oleh pepohonan yang besar. (wawancara dengan Ibu Camat H.J.S.R tanggal 10 juli 2015)

Senada yang dikemukakan oleh Rahmatia, S.Sos, beliau mengatakan bahwa:

“ untuk perlindungan alam maupun budaya di Kecamatan tinggi Moncong ini kami sudah memberikan tugas kepada pengelola maupun masyarakat

sebagai penjaga maupun petugas kebersihan disana, dimana masyarakat yang kami tugaskan untuk sementara berfokus untuk membersihkan daerah sekitar tempat wisata. Selain itu fasilitas yang ada ditempat wisata ini seperti rumah penginapan, tempat makan dan lain-lain selalu dibersihkan masyarakat dan petugas yang ada disana sehingga wisatawan yang datang berujung merasa betah dan nyaman selama berada di obyek wisata.(wawancara dengan Ibu R.H tanggal 10 juli 2015)

Dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa pemerintah dan masyarakat dalam menjaga alam, budaya ataupun fasilitas-fasilitas yang ada ditempat obyek wisata ini memberdayakan masyarakat sebagai petugas kebersihan di tempat wisata Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.

Perlindungan lingkungan allam dan budaya yang indah dan lestari merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia dan segala lapisan kehidupan yang ada didalamnya, khususnya di kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Budaya itu sendiri adalah keseruhan hasil usaha manusia, baik berupa benda ataupun hanya berupa pikiran. Bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan budaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Camat Tinggi Moncong dan jajarannya dengan memberdayakan masyarakat untuk menjaga dan membersihkan obyek wisata yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong (Malino), Sebagaimana yang dikatakan oleh D.N

“Saya sebagai pengelola dan dibantu oleh bebrapa orang lainnya kami tetap menjaga lingkungan, Budaya dan fasilitas yang ada sehingga nantinya para wisatawan bisa merasa nyaman erkunjung ketempat ini”.: (wawancara dengan Bapak D.N tanggal 20 juli 2015)

1.2 Membuka Akses Jalan Menuju Tempat Objek Wisata

Akses merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan umum yang sangat penting , tersedianya prasarana jalan baik kualitas

maupun kuantitas sangat menentukan mudah dan tidaknya suatu daerah dijangkau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Camat H.J.S.R dapat diketahui sebagai berikut :

“bahwa menurut saya jalanan yang menuju ketempat wisata yang ada di Kecamatan Tinggi moncong sudah baik dan sangat mudah dijangkau oleh wisatawan, kemudian dari segi prasarana juga sudah agak baik juga” (wawancara H.J.S.R tanggal 21 juli 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kondisi infrastruktur jalan menuju objek wisata sudah memadai dan baik dan arus transportasi sudah baik juga.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak D.N dapat diketahui sebagai berikut :

“bahwa objek wisata di Kecamatan Tinggi Moncong memang sangat mudah dijangkau dan cepat karena pembangunan jalanan sudah baik dan fasilitas disini juga baik”(wawancara Bapak D.N tanggal 21 juli 2015).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat khususnya dalam perlindungan alam dan menjaga fasilitas yang ada sudah cukup optimal.

2. Upaya Pemerintah Kecamatan Tinggi Moncong dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian upaya dalam melakukan pemberdayaan adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya sehingga pemberdayaan bisa berjalan.

Upaya Pemerintah Kecamatan Tinggi Moncong dalam melakukan pemberdayaan masyarakat adalah memfasilitasi “(menyediakan sarana dan

prasarana)” dan memberikan pemahaman “(memberikan pendidikan dan pelatihan)” kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan dan mengelolah tempat wisata yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong.

Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham termotivasi, berkesempatan, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu berbagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi dan mampu bertindak sesuai dengan situasi. Proses pemberdayaan yang melahirkan masyarakat yang memiliki sifat seperti yang diharapkan harus dilakukan secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat secara bertanggungjawab.

2.1. Menyediaan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana wisata merupakan pelengkap daerah tujuan wisata yang di perlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana dan prasarana wisata di daerah tujuan wisata maupun obyek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, lebih dari selera pasar pun dapat menentukan tuntutan sarana dan prasarana wisata yang dimaksud.

Sarana pariwisata sebagai ujung tombak wisata kepariwisataan dapat diartikan sebagai usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada wisatawan pada suatu daerah tujuan wisata dimana keberadaannya sangat tergantung kepada wisatawan. Dengan adanya kegiatan perjalanan wisata serta sarana dan prasarana yang cukup memadai membuat

obyek wisata Maino begitu maksimal dengan pengembangannya dan beberapa sarana yang ada di desa wisata kecamatan tinggi moncong seperti obyek dan atraksi wisata, penginapan dan akomodasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik bagi pengunjung.

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas yang tersedia sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan pengunjung untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Bentuk prasarana dimaksud yang ada di pariwisata Kecamatan Tinggi Moncong seperti vila malino, rumah sewa, dan mini market.

Dan itu juga di rasakan oleh pemerintah daerah dalam proses pengelolaan obyek wisata Malino. Seperti apa yang dikemukakan oleh Camat Tinggi Moncong H.J.S.R.

“Salah satu yang menjadi pendukung obyek wisata Malino adalah sarana dan prasarana yang cukup memadai. Walaupun Dana belum semaksimal yang ditargetkan. Akan tetapi kami akan terus berusaha agar pengembangan obyek wisata Malino terus berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama”. (wawancara dengan Ibu H.J.S.R tanggal 10 Juli 2015)

Pernyataan diatas di pertegas oleh ibu RH mengatakan :

“Salah satu upaya pemerintah untuk pemberdayaan tempat wisata, harus menyediakan sarana dan prasarana yang semaksimal mungkin agar para pengunjung benar-benar merasa nyaman. Dan saya rasa ditempat wisata ini jika kita bercerita mengenai sarana dan prasarana sudah tidak ada masalah”.(wawancara dengan Ibu RH tanggal 10 juli 2015)

Senada dengan apa yang di katakana salah satu pengunjung Bapak BS :

“Mengenai sarana dan prasarana disini saya kira tidak ada masalah semuanya normal bersih.Seperti wc umum, mushoolla semuanya terjaga kebersihannya”. (wawancara dengan Bapak BS tanggal 5 Agustus)

Dari hasil wawancara diatas dapat analisis bahwa Salah satu upaya pemerintah dalam pemberdayaan pariwisata menyangkut sarana dan prasarana

sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, dimana sarana dan prasarana merupakan faktor pendorong dan dapat menarik minat wisatawan untuk datang menikmati tempat wisata tersebut.

2.2 Memberikan Pendidikan Dan Pelatihan Kepada Pengelola Objek Wisata Dan Masyarakat.

Kesuksesan dalam pengembangan pariwisata diperlukan pemahaman yang baik. Pemerintah harus memperhatikan dan memastikan bahwa pengembangan pariwisata itu akan mampu memberikan keuntungan sekaligus menekan biaya sosial ekonomi serta dampak lingkungan sekecil mungkin. Pemerintah membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Pendidikan dan pelatihan kepada pengelola objek wisata dan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau pengalaman dalam mengelola objek desa wisata, agar pengunjung dapat dengan mudah mengetahui lokasi wisata yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong.

Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja. Dan salah satu bentuk pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak pengelola dan masyarakat yaitu pelatihan percetakan baju dan penguasaan teknologi informasi secara langsung dalam mempromosikan desa wisata di Kecamatan Tinggi Moncong.

Dalam mempromosikan pariwisata yang berada di Kecamatan Tinggi Moncong, masyarakat yang telah dibekali pelatihan percetakan baju memilih

untuk mencetak sebuah produk seperti baju. Produk tersebut mewakili citra desa setempat yang dapat digunakan untuk mempromosikan wilayah wisata dalam menarik wisatawan domestik maupun non domestik.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengaplikasikan proses pelatihan yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan sebuah produk tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi baik itu audio, visual, dan audio visual. Sebagai contoh pemanfaatan teknologi informasi yang mereka gunakan yaitu tersedianya data informasi yang detail tentang objek wisata, sarana dan prasarana yang dapat diakses dengan mudah, serta memberikan informasi tentang budaya kearifan lokal yang menjadi ikon wilayah tersebut. Hasil dari informasi ini kemudian mereka kemas dalam bentuk paket kegiatan wisata di mana penyedia jasa pariwisata dan wisatawan dapat berinteraksi satu sama lain untuk memberi dan menerima informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu RH dapat diketahui sebagai berikut :

“bahwa pemerintah dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pengelola dan masyarakat selama ini sudah memadai meski belum menyeluruh apalagi mengenai pelatihan dan pendidikan kepada pengelola objek wisata” (wawancara Ibu RH tanggal 23 juli 2015)

Dari hasil wawancara diatas dapat analisis bahwa dalam meningkatkan sumber daya manusia, pengelola, dan masyarakat belum baik karena hal ini disebabkan pemerintah dan pariwisata belum sepenuhnya memberikan pelatihan serta pendidikan kepada seluruh pengelola objek wisata dan masyarakat pada umumnya yang ada di daerah tersebut.

Seperti halnya yang dikatakan oleh Ibu WN dapat diketahui sebagai berikut;

“memang kalau saya lihat selama ini pemerintah sudah terjun langsung kelapangan, tapi pengelola masih kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan secara menyeluru dalam memberikan pendidikan maupun pelatihan serta motivasi kepada masyarakat sehingga pengelolaan bisa efektif dalam mengelola desa wisata yang ada di Kecamatan Tinggi Moncong ”.(wawancara Ibu WN tanggal 25 2015)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan objek wiasata Tinggi Moncong masih belum berjalan efektif, karena pelatihan dan pendidikan belum sepenuhnya menyeluruh. Pemerintah dalam memberikan motivasi kepada pengelola objek wisata dan masyarakat seperti adanya pelatihan dan pemberian pendidikan mengenai tata cara pengelolaan objek wisata, sehingga sumber daya manusia akan meningkat dengan baik. Hasil observasi dilapangan bahwa peningkatan sumber daya manusia yang ada di masyarakat sudah baik karena adanya keterlibatan pemerintah dinas kebudayaan dan parawisata dalam pengelolaan objek wisata.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan pariwisata di Kecamatan Tinggi Moncong sudah sesuai dengan apa yang diharapkan seperti, perlindungan terhadap tempat wisata alam, dan membuka akses jalan menuju tempat wisata yang merupakan faktor utama untuk kelancaran menuju tempat wisata.
2. Upaya pemerintah Kecamatan Tinggi Moncong dalam melakukann Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan dan menghasilkan respon positif dari masyarakat seperti pemberdayaan pemerintah mengenai penyediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang minat wisatawan, dan memberikan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan pariwisata

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan keamanan dan makin memperhatikan keindahan alam sekitar
2. Diperlukannya akses jalan yang lebih baik agar wistawan mudah menjangkau tempat-tempat wisata.

3. Diperlukan adanya penambahan sarana dan prasarana agar para wisatawan semakin menikmati tempat wisata yang ada di Malino.
4. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pemahaman dalam mengelola objek wisata.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1985, *Mengenal Sepuluh Daerah Tujuan Wisata Indonesia*, Direktorat Jendral Pariwisata Republik Indonesia, Jakarta
- Adji Sakti Adisasmita, 2011, *Pembangunan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Aziz, 2005. *Strategi dan pendekatan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta
- D, Samsuridjal dan Kaelany HD. *Peluang Di Bidang Pariwisata*. Jakarta. Mutiara Sumber Widya. 1997.
- Departemen Dalam Negeri, 2000. *Tentang Visi, Misi, Startegi, dan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.
- Ditjen Pariwisata. 1999. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, Jakarta
- Edi, Suharto. 2011. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT RefikaAditama.
- Happy Marpaung. 2000. *Pengetahuan Kepariwisataaan*, Bandung. Alfabeta.
- Hartono, 1974. *Pengaruh kegiatan pariwisata*. Yogyakarta
- Ida Made Sukarsa, 1999, *Pengantar Pariwisata, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan tinggi Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Indonesia Timur, Makassar*.
- Istiarti, V.G Tinuk, Priyadi N, Laksmono W, Emmy R. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: UndipPress.
- James J. Spilane, 1987, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *POWER DAN EMPOWERMENT: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*.
[http://www.ginandjar.com/public/12PowerdanEmpowerment .pdf](http://www.ginandjar.com/public/12PowerdanEmpowerment.pdf). diakses pada tanggal 7 Juli 2014 pukul 22:00.
- Kusmayadi dan EndarSugiatro. *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisataaan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 2000.
- Madekhan, 2007. *Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk partisipasi*. Brawijaya

- Mardi YatmoHutomo. 2000.*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritis Dan Implementasi*. Jakarta: Bappenas.
- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: sebuah pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nuryanti, 1993.*Bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi*. Gadjah mada
- Oka A. Yati..*Peran Industry Pariwisata Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Pariwisata STP Trisakti, Vol. 10 (Maret 2006)
- Oka A. Yati, 1994, *Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa, Bandung*
- Pranarka A.M.W. dan prijonoony S, 1996, “*pemberdayaan : Konsep, kebijakan dan implementasi*”, Jakarta, CSIS.
- Soebagyo, 1991. *Kehidupan desa sebagai tujuan wisata*. Bandung
- Soemardjan, 1977. *Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah*. Jakarta
- Soetomo dKK, 1992, *Pembangunan Desa di Indonesi , Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Desa*, Laporan Penelitian, PAU Studi Sosial UGM, Yogyakarta
- Sulistiyani, 2004. *Membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri*. Jakarta
- Sulistiyani, 2004. *Tujuan pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia
- Sumodiningrat, Gunawan, 2002. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta
- Sunyoto, 2003. *Strategi dan pendekatan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta
- Tjokowinoto, 2005. *Kegiatan pemberdayaan*. Yogyakarta
- Waluyo, Harry. *Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata*. (Studi Kasus Di Daerah Riau Kepulauan Propinsi Riau). Jakarta. Depdikbud. 1994/1995.
- Wardiyanta, 2006, *Metode Penelitian Pariwisata, Andi*. Yogyakarta
- Widiyanto, 2008. *Pengembangan potensi wisata*. Jakarta